

Dibangun Bertahap, Butuh Rp12 Miliar Untuk Bangun Pasar Klandasan

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemkot Balikpapan melalui Dinas Perdagangan Kota Balikpapan tengah mempersiapkan lelang terhadap proyek renovasi Pasar Klandasan.

Pasalnya, pada tahun 2022 ini Pemkot Balikpapan berencana akan merenovasi pasar tersebut melalui Anggaran sudah tersedia dari APBD tahun 2022 senilai Rp12 Miliar.

Berdasarkan perencanaan awal, proses lelang akan berjalan dalam triwulan I. Sedangkan tahapan pelaksanaan berlangsung pada triwulan II – IV.

“Kalau proses pembangunannya saja, kami targetkan selesai dalam 3–4 bulan,” ujar Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan, Arzaedi Rachman, Minggu (27/02/2022).

Arzaedi mengatakan, proyek pembangunan Pasar Klandasan ini tidak bisa langsung berjalan begitu saja karena harus ada kegiatan pembuatan pasar penampungan sementara dulu. Pasalnya, saat pasar dibongkar, pihaknya harus menyediakan tempat pedagang untuk berjualan.

“Jadi tunggu penampungan sementara selesai dibangun, pedagang pindah dan kami bisa bongkar untuk renovasi pasarnya,” jelasnya.

Kendati demikian, kata Arzaedi, proses pembongkaran bangunan yang ada harus menunggu proses lelang selesai sehingga belum bisa dikerjakan dari sekarang. Dinas Perdagangan Kota Balikpapan harus memastikan dulu bahwa tahapan lelang berhasil rampung, mengingat bisa saja ada potensi gagal lelang.

“Jadi Kondisi lainnya jika waktu ternyata tidak cukup,

anggaran tak bisa digunakan,” ucapnya.

Total kebutuhan anggaran untuk renovasi Pasar Klandasan, katanya, diperhitungkan sebanyak Rp 12 miliar. Dan untuk tahun 2022 ini, Pemkot Balikpapan mengalokasikan dana Rp 3 miliar dalam APBD Balikpapan 2022, khususnya untuk renovasi bagian pasar basah.

“Jadi pembangunan bertahap, tidak mungkin langsung selesai sekali,” jelasnya.

Dinas Perdagangan mengutamakan renovasi pasar basah terlebih dulu karena kondisinya banyak yang bocor. Sementara desain yang dibuat sudah secara keseluruhan.

Saat ini Dinas Perdagangan, katanya, juga masih berupaya meminta bantuan kepada pemerintah pusat agar sebagian pembangunan bisa menggunakan dana APBN.

“Kami berharap sisanya bisa menggunakan APBD provinsi atau APBN. Semoga dapat bantuan juga agar kita bisa menyelesaikan pembangunan secara paripurna,” tutupnya.